

URGENSI PEMERIKSAAN BEDAH MAYAT DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Oleh : Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita¹ dan Sigid Riyanto²

INTISARI

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan. Pertama, untuk mengetahui peran pemeriksaan bedah mayat dalam membantu pembuktian tindak pidana pembunuhan. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan bedah mayat dan penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan pemeriksaan bedah mayat guna pembuktian tindak pidana pembunuhan.

Metode penelitian yang penulis gunakan ialah gabungan antara metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini ialah di wilayah yurisdiksi Kepolisian Sektor Cakranegara dan Pengadilan Negeri Mataram. Penulis memperoleh data dari penelusuran bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta dari data primer di lapangan melalui wawancara. Data yang diperoleh kemudian diolah secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Pertama, pemeriksaan bedah mayat dilakukan dalam beberapa kasus untuk membantu pembuktian tindak pidana pembunuhan di wilayah yurisdiksi Kepolisian Sektor Cakranegara dan hakim berpandangan bahwasanya hasil *visum et repertum* berdasarkan pemeriksaan bedah mayat dapat menyempurnakan keyakinan hakim dalam menentukan telah terjadi atau tidaknya suatu tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu urgensi pemeriksaan bedah mayat dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan menjadi sangat penting. Kedua, pelaksanaan pemeriksaan bedah mayat mengalami berbagai kendala dan opsi virtual hadir sebagai penyelesaian dari berbagai kendala pemeriksaan bedah mayat kedepannya. Tetapi, saat ini keberadaan hasil *visum* berdasarkan opsi virtual sebagai alat bukti masih sulit diakui mengingat istilah tersebut belum dikenal dalam berbagai kaidah hukum acara pidana di Indonesia. Jika penegak hukum dapat melakukan penemuan hukum untuk mengakui hasil *visum et repertum* berdasarkan opsi virtual sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan, maka urgensi pemeriksaan menjadi tidak terlalu penting, tetapi tetap akan dibutuhkan kedepannya.

Kata Kunci : Pemeriksaan Bedah Mayat, Pembuktian, Pembunuhan

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

THE URGENCY OF POST-MORTEM AUTOPSY IN PROVING OF MURDER CRIME

By : Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita³ and Sigid Riyanto⁴

ABSTRACT

This study has 2 (two) objectives. First, to find out the role of post-mortem autopsy in assisting the evidence of murder crimes. Second, to find out and analyze the constraints that become obstacles in the implementation of post-mortem autopsy and settlements taken by the parties concerned in carrying out post-mortem autopsy in order to prove the crime of murder.

The research method that the author uses is a combination of normative legal research method and empirical law research. The location of this research is in the jurisdiction of Kepolisian Sektor Cakranegara and Pengadilan Negeri Mataram. The author obtains data from the search for primary, secondary and tertiary legal materials as well as from primary data in the field through interviews. The data obtained is then processed descriptively qualitatively.

Based on the research that the authors have done, the results are obtained as follows. First, the post-mortem autopsy is carried out in several cases to help proving the murder crime in the jurisdiction of the Kepolisian Sektor Cakranegara and the judge agrees that the results of visum et repertum based on the post-mortem autopsy can improve the judge's belief in determining whether or not a crime of murder has occurred. Therefore the urgency of post-mortem autopsy in proving of murder crime becomes very important. Second, the implementation of post-mortem autopsy underwent various obstacles and virtual autopsies show up as a solution to the various constraints of post-mortem autopsy in the future. However, currently, the existence of visum et repertum based on virtual autopsies as evidence is still difficult to be recognized in considering the term is still unknown in various rules of criminal proceedings in Indonesia. If law enforcement can make legal findings to recognize the results of visum et repertum based on virtual autopsy as evidence in proving a crime of murder, then the urgency of the post-mortem autopsy becomes not very important, but it will still be needed in the future.

Keywords : Post-mortem Autopsy, Proving, Murder.

³ Undergraduate Student at Criminal Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Lecturer at Criminal Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.